

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Problematika yang sering terjadi di negara berkembang yang masih belum juga dapat teratasi sampai sekarang ini adalah kemiskinan yang terjadi di tengah-tengah kota. Berbagai upaya penanggulangan kemiskinan diterapkan di setiap daerah di Indonesia. Namun tetap saja permasalahan kemiskinan masih belum dapat dientaskan. Jumlah penduduk miskin yang banyak di Indonesia menjadikan tantangan bagi pemerintah untuk mengembangkan ekonomi masyarakat.

Secara nasional, menurut Badan Pusat Statistika (BPS), pada Maret 2019, presentase penduduk miskin di Indonesia sebesar 9,41% persen. Jumlah ini menurun 0,25% dari tahun sebelumnya (pada September 2018) dan 0,41% pada (Maret 2018). Rata-rata rumah tangga miskin di Indonesia terdiri dari 4,68 orang anggota rumah tangga (pada Maret 2019). Hal ini menunjukkan rata-rata garis kemiskinan rumah tangga sebesar Rp. 1.990.170,-/rumah tangga miskin/bulan.¹ Pada Desember 2019, Kota Cirebon mengalami inflasi sebesar 0,44 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 132,58. Dari 7 kota pantauan IHK di Provinsi Jawa Barat, tercatat semua kota mengalami inflasi. Inflasi tertinggi terjadi di Kota Bandung (0,45 persen) dan terendah di Kota Depok (0,18 persen).

¹Badan Pusat Statistika (BPS), “Persentase Penduduk Miskin Maret 2019 sebesar 9,41%”, <https://www.bps.go.id/pressrelease/2019/07/15/1629/persentase-penduduk-miskin-maret-2019-sebesar-9-41-persen.html>, diakses tanggal 19 Oktober 2020.

Kondisi kemiskinan di Indonesia perlu diwaspadai. Walaupun secara data statistik mengalami penurunan, secara kualitas kemiskinan di Indonesia saat ini menjadi semakin kronis. Kegagalan dalam mengatasi persoalan kemiskinan bisa berdampak pada munculnya persoalan lain di tengah masyarakat. Sekarang, persoalan kemiskinan sudah berdampak pada bermacam-macam tindakan kriminal yang terjadi di masyarakat seperti perampokan.

Upaya pengentasan dan penanggulangan kemiskinan di negeri ini ditandai dengan perubahan yang semula berorientasi pada pertumbuhan ekonomi menjadi berorientasi pada pemberdayaan masyarakat. Bentuk dari upaya pemerintah ini diharapkan dapat membentuk masyarakat yang mandiri di lingkungannya dan memiliki daya tahan sosial yang baik guna melindungi kelompok dan berperilaku dinamis dalam menghadapi perubahan dari segi ekonomi, politik, dan sosial yang terjadi. Dalam konteks pemberdayaan, yang menjadi aktornya adalah masyarakat baik laki-laki maupun perempuan. Peranan aktor pemberdayaan sama dalam hal memantau, ikut serta dalam setiap kegiatan, berorientasi pada perencanaan, dan termasuk sebagai pemetik hasil pembangunan.

Dewasa ini, dalam hal pemberdayaan masyarakat miskin di atas, perempuan banyak terlibat. Banyak perempuan memainkan peran ganda bahwa selain dari mengurus anak dan melayani suami, mereka juga ikut serta dalam membantu mensejahterakan perekonomian keluarga. Terlebih di zaman sekarang ini di mana semakin majunya perkembangan zaman dan teknologi mengakibatkan semakin tinggi pula kebutuhan hidup keluarga. Hal ini menyebabkan bertambahnya kesulitan dalam pemenuhan kebutuhan hidup. Akibatnya, banyak perempuan

terdorong untuk bekerja agar bisa membantu untuk memenuhi ekonomi keluarga demi tujuan tercapainya kesejahteraan hidup dan hidup yang berkualitas.

Namun, dalam kenyataannya, perempuan yang terlibat dalam pemberdayaan keluarga ini belum mendapat perhatian penuh. Padahal, peranan perempuan dalam masyarakat tidak bisa dipandang rendah karena mereka mempunyai peran aktif di masyarakat melalui pemberdayaan perempuan sebagai bentuk pemahaman bahwa perempuan (ibu) merupakan aktor pencetak generasi yang berkualitas.²

Fakta di atas mengenai perempuan yang berperan ganda untuk mensejahterakan keluarga menarik untuk ditelaah lebih jauh. Karena itu penulis tertarik untuk meneliti isu tentang peranan yang dimainkan oleh kaum perempuan dalam memberdayakan diri mereka melalui pemberdayaan ekonomi dan pendidikan dalam peningkatan kesejahteraan keluarga mereka. Untuk mengkaji topik ini, dalam konteks skripsi ini, penulis memfokuskan kajian pada kasus Kelompok Wanita Tani (KWT) Secerah Pagi yang terletak di Kampung Merbabu Asih, Kelurahan Larangan, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon.

1.2. Identifikasi Masalah

Untuk keperluan studi ini, penulis melakukan pengamatan awal dari Kampung Merbabu Asih, yang berada di Kelurahan Larangan, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon. Berdasarkan pengamatan tersebut, penulis mengidentifikasi masalahnya sebagai berikut:

²Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebianto, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik* (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 62.

1. Permasalahan kemiskinan yang masih menjadi problematika di negara berkembang, khususnya perkotaan;
2. Inflasi daerah yang terus mengalami peningkatan;
3. Pemberdayaan terhadap kelompok yang termarginalkan; dan
4. Upaya meningkatkan kesejahteraan keluarga.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang dan identifikasi masalah di atas, studi ini bermaksud menjawab masalah-masalah penelitian sebagai berikut:

1. Apa program yang dilaksanakan oleh Kelompok Wanita Tani (KWT) Secerah Pagi untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga di Kampung Merbabu Asih, Kelurahan Larangan, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat Kelompok Wanita Tani (KWT) Secerah Pagi untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga di Kampung Merbabu Asih, Kelurahan Larangan, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon? dan
3. Apa dampak dari pelaksanaan program pemberdayaan perempuan melalui Kelompok Wanita Tani (KWT) Secerah Pagi untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga di Kampung Merbabu Asih, Kelurahan Larangan, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon?

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, studi ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui program yang dilaksanakan oleh Kelompok Wanita Tani (KWT) Secerah Pagi dalam peningkatan kesejahteraan keluarga di Kampung Merbabu Asih, Kelurahan Larangan, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon;
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat Kelompok Wanita Tani (KWT) Secerah Pagi dalam peningkatan kesejahteraan keluarga di Kampung Merbabu Asih, Kelurahan Larangan, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon; dan
3. Untuk mengetahui dampak dari pelaksanaan program pemberdayaan perempuan melalui Kelompok Wanita Tani (KWT) Secerah Pagi dalam peningkatan kesejahteraan keluarga di Kampung Merbabu Asih, Kelurahan Larangan, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon.

1.5. Kegunaan Penelitian

Studi ini diharapkan dapat memberikan manfaat akademis dan praktis. Secara akademis, penelitian ini dapat menambah khazanah literatur umum dalam bidang ilmu sosial yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat. Secara khusus, penelitian ini merupakan kontribusi bagi studi tentang pemberdayaan perempuan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Secara praktis, penelitian ini berguna sebagai masukan dalam melakukan pengambilan kebijakan oleh tokoh masyarakat dan fasilitator pemerintah dalam

membuat program kebijakan untuk masalah pemberdayaan perempuan dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga.

1.6. Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori pemberdayaan yang dikemukakan oleh Jim Ife sebagai kerangka teoritiknya. Ife mengatakan bahwa pemberdayaan ditujukan untuk meningkatkan kekuasaan (*power*) dari kelompok masyarakat yang kurang beruntung (*disadvantaged*): Menurutinya, “*empowerment aims to increase the power of the disadvantaged*” (pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kekuatan yang kurang beruntung). Masyarakat yang kurang beruntung merupakan masyarakat yang mengalami keterbelakangan termasuk kelompok *marginal* (misalnya, perempuan).

Pemberdayaan diharapkan dapat meningkatkan kelompok masyarakat yang lebih berkualitas sumber daya manusianya. Jim Ife mengemukakan bahwa pemberdayaan dapat dilakukan dengan menyediakan dan menyiapkan modal pembangunan sumber daya manusia, sumber daya alam, kesempatan masyarakat untuk berinovasi dalam pembangunan, memberikan pengetahuan, dan keterampilan bagi masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup sumber daya manusia yang berketerampilan dan keahlian sehingga mereka bisa terberdayakan secara mandiri untuk mencapai kesejahteraan.

Kemampuan berdaya (masyarakat berdaya) mempunyai arti yang sama dengan kemandirian masyarakat. Salah satu cara yang populer untuk meraihnya adalah dengan membuka kesempatan bagi masyarakat (seluruh elemen) dalam seluruh tahapan program.

Strategi pemberdayaan, menurut Jim Ife, memiliki tiga strategi yang bisa diterapkan untuk pemberdayaan masyarakat.¹³

Pertama, perencanaan dan kebijakan. Perencanaan dilakukan untuk menciptakan perubahan baik secara struktur maupun institusi sehingga masyarakat dapat mengembangkan dan mengakses berbagai sumber kehidupan dalam meningkatkan kesejahteraan. Penyediaan sumber kehidupan yang cukup diharapkan dapat mencapai masyarakat yang berdaya dan mandiri di masyarakat. Sehingga daya tahan sosial yang terbentuk akan semakin kuat. Misalnya, membuka peluang kerja, menaikkan Upah Minimum Regional (UMR), dan melakukan pemberdayaan di tingkat perkotaan sampai ke tingkat pedesaan sesuai dengan kebutuhan masyarakat sehingga pemberdayaan dapat berjalan dengan baik di masyarakat.

Kedua, aksi sosial dan politik. Bentuk pemerintahan Indonesia yang demokratis memungkinkan masyarakat ikut dalam kegiatan penyuaran pendapat. Karena suara rakyat dijadikan aspek penentu kebijakan, oleh karena itu perlu adanya partisipasi masyarakat dalam sistem politik di Indonesia. Bentuk keterlibatan masyarakat secara politik diharapkan dapat membuka peluang dalam tercapainya keberdayaan masyarakat.

Ketiga, peningkatan kesadaran dan pendidikan. Masyarakat seringkali tidak menyadari keadaan pada dirinya yang sedang tertindas. Kondisi penindasan diperparah dengan tidak diperolehnya *skill* dan kemampuan untuk bertahan hidup secara sosial dan ekonomi. Dalam permasalahan ini, Jim Ife memberikan arahan

³ Robert Chambers, *Pembangunan Desa: Mulai dari Belakang* (Jakarta: LP3ES, 1987), hlm. 86.

mengenai perlunya peningkatan kesadaran dan pendidikan yang diterapkan kepada masyarakat. Misalnya, memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai bagaimana bentuk atau struktur penindasan yang terjadi, kemudian memberikan sarana dan keahlian khusus agar terbentuk sumber daya manusia yang inovatif dan mencapai perubahan secara efektif di masyarakat.

Menurut Ife, pendamping masyarakat berperan fasilitator masyarakat. Artinya, seorang fasilitator masyarakat bukan hanya berperan dalam proses pengelolaan kegiatan saja, melainkan juga memperkuat kapasitas masyarakat dengan kegiatan pembelajaran, pembangunan jaringan, pemanfaatan modal pembangunan, keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan sebagai bentuk inovasi sosial, dan pelaksanaan manajemen atau perencanaan di lapangan.

Pemberdayaan mengandung arti perbaikan kesejahteraan atau mutu hidup bagi setiap individu dan masyarakat. Hal ini dapat dilihat adanya peningkatan taraf hidup dalam hal-hal berikut: (a) perbaikan ekonomi dengan tercukupinya pangan; (b) perbaikan kesejahteraan sosial dengan meningkatkan kualitas hidup melalui pendidikan dan kesehatan; (c) kemerdekaan dari segala bentuk penindasan; (d) terjaminnya keamanan (tidak ada rasa takut); dan (e) terjaminnya hak asasi manusia.⁴

Dalam konteks studi ini, konsep pemberdayaan Ife di atas akan diterapkan sebagai berikut.

⁴ Mardikanto dan Sebianto, *Pemberdayaan Masyarakat*, hlm. 28.

Pertama, perencanaan dan kebijakan pemerintah mengenai Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) yang mengajak masyarakat untuk menekan terjadinya inflasi yang dikhususkan kepada perempuan dalam program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) dengan pemanfaatan lahan di perkotaan melalui Kelompok Wanita Tani (KWT) dengan menggunakan sistem *urban farming* (pertanian di perkotaan).

Kedua, aksi sosial dan politik masyarakat dilakukan dengan membentuk keterlibatan masyarakat secara politik dan aksi sosial yang dapat mempengaruhi kebijakan dalam melakukan pemberdayaan dengan melakukan pengajuan terhadap kegiatan atas modal pembangunan/sosial yang sudah terdapat di lingkungannya. Dengan ini, kebijakan pemerintah dan keadaan masyarakat yang akan diberdayakan menjadi sejalan dan diharapkan akan mempengaruhi terhadap keberhasilan pemberdayaan.

Ketiga, peningkatan kesadaran dan pendidikan terhadap perempuan dalam memanfaatkan pekarangan rumah dengan menanam berbagai macam tanaman yang dapat dikonsumsi pribadi atau dijual guna mengurangi pengeluaran kebutuhan keluarga. Perempuan diberikan arahan dalam membudayakan pola konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang, dan aman agar tercipta kualitas hidup dalam keluarga dan kesadaran akan daya tahan sosial.

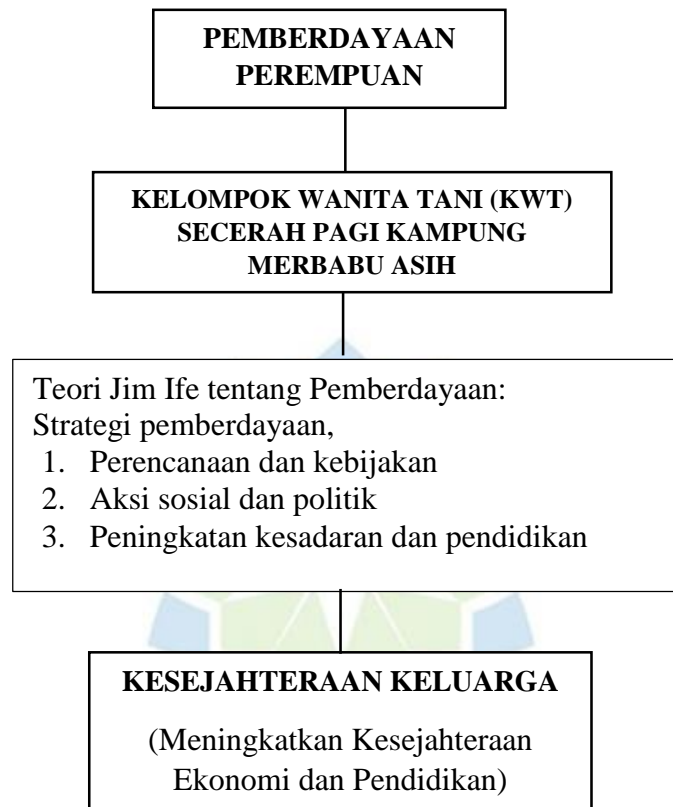
Dalam konteks studi ini, Kelompok Wanita Tani (KWT) berfungsi sebagai wadah bagi pemberdayaan perempuan. Kelompok pemberdayaan ini menyiasati dalam pemenuhan kesejahteraan keluarga dengan melakukan gerakan pemanfaatan lahan di pekarangan rumah yang kemudian hasil panennya bisa dikonsumsi pribadi sebagai bentuk penghematan terhadap biaya pengeluaran keluarga dan bisa

dikalkulasikan kepada kebutuhan yang lain yang lebih dibutuhkan dalam upaya menopang kualitas hidup keluarga. Serta pemberian penyuluhan mengenai pendidikan guna menambah pengetahuan intelektual dari Kelompok Wanita Tani (KWT) untuk mensejahterakan keluarga.

Ketika keluarga telah berada pada tingkat sejahtera, angka kematian pada keluarga tersebut semakin rendah karena kesejahteraan keluarga merupakan bentuk dari penekanan angka kematian dalam keluarga karena telah mencapai taraf hidup yang berkualitas. Perempuan dalam hal ini dapat berperan sebagai aktor pencetak generasi bangsa yang produktif di masyarakat karena pembelajaran seorang anak berawal dari seorang ibu di dalam keluarga.

Oleh karena itu, perlu adanya pemberdayaan perempuan sebagai penambah kemampuan pengembangan intelektual dan etika guna membentuk karakter generasi penerus yang berpendidikan, mempunyai kesadaran sosial yang tinggi, peka terhadap lingkungan, dan memiliki kemampuan kreatif dan inovatif melalui pemanfaatan ekonomi. Ke depannya, hal ini akan membentuk daya tahan sosial yang dapat melindungi kelompok dan lingkungannya akibat perubahan sosial, ekonomi, dan politik yang terjadi sehingga perempuan akan terbiasa untuk mandiri dan menekan terjadinya peminggiran terhadap perempuan.

Berdasarkan kerangka berfikir yang peneliti jabarkan di atas, dapat digambarkan kerangka berfikir sebagai berikut:



Gambar 1. 1
Kerangka Pemikiran Penelitian